

**PROSES DAN TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DENGAN  
SURAT PAKSA UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN  
WAJIB PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA TEBET**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan

Mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

RIANI

NIM : 02420008



**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI**

**UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

**JAKARTA**

**2007**



**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI  
UNIVERSITAS DARMA PERSADA**

**PERSETUJUAN**

Skripsi yang berjudul :

**“Proses dan Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk  
Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta**

**Tebet “**

Oleh :

**Nama : Riani**

**NIM : 02420008**

Telah disetujui untuk diajukan

Jakarta, Juli 2007

Ketua Jurusan Akuntansi

Dosen Pembimbing Materi

**(Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM)**

**(Muhammad Masdar SE, Ak)**



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DARMA PERSADA  
JURUSAN AKUNTANSI

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul :

**“Proses dan Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk  
Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta  
Tebet “**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Tim Penguji Skripsi pada

Hari : Selasa




Tanggal : 31 Juli 2007

Oleh :

Nama : Riani

NIM : 02420008

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Muhammad Masdar, SE,Ak	Pembimbing	
2. Drs. Haryanto, Ak,MM	Penguji 1	
3. Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak,MM	Penguji 2	

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riani  
NIM : 02420008  
Jurusan : S - 1 Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Skripsi sarjana yang berjudul :

**“Proses dan Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet”.**

Merupakan skripsi yang saya susun di bawah bimbingan Bpk. Muhammad Masdar,SE, Ak. tidak merupakan jiplakan skripsi atau karya orang lain, sebagian atau seluruhnya, dan isi sepenuhnya tanggung jawab sendiri.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, Juli 2007

Yang membuat pernyataan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp is from the Indonesian Tax Authority (Ditjen Pajak) and features the Garuda Pancasila emblem. The stamp includes the text 'DITJEN PAJAK' and 'KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA'. The number '60' is visible on the stamp, and the name 'Riani' is written below the signature.

( Riani )

## ABSTRAK

- (A) Riani, Nim : 02420008
- (B) Proses dan Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet
- (C) ix + 62 ; 2007
- (D) **Kata kunci** : Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak
- (E) **Alasan dan Tujuan Penelitian** : Untuk mengetahui bagaimana proses dan tata cara yang dipergunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet dalam melaksanakan kegiatan penagihan serta sebab-sebab diturunkannya Surat Paksa dari KPP kepada Wajib Pajak. Apakah pengenaan Surat Paksa tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.  
**Metode penelitian** : Data yang diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung mengumpulkan dan mengolah data dari objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber di luar objek penelitian yaitu dengan membaca buku-buku, surat kabar dan reser ke perpustakaan – perpustakaan yang dapat menunjang objek yang diteliti.  
**Kesimpulan dan Saran** : Kegiatan Penagihan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, diharapkan kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet untuk tetap mempertahankan kinerja yang baik.
- (F) Daftar Acuan : 6 Buku ( 2003- 2005 )
- (G) Dosen Pembimbing : Muhammad Masdar, SE, Ak..

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT berkat, rahmat dan anugerahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akutansi Universitas Darma Persada.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada :

1. Papa, Mama, kak Chi2, kak Lloyd, Rafqa, dan Jean yang selalu mendoakan, mendukung moril serta materil, mendampingi penulis dalam semua kegiatan.
2. Bapak Muhammad Masdar, SE, Ak. selaku dosen pembimbing yang sudah sangat baik dengan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan pengarahannya serta bimbingan serta semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak. MM. selaku Ketua Jurusan Akutansi Universitas Darma Persada, Jakarta.
4. Ibu Dra. Sri Ari Wahyuningsih, MM. selaku Sekretaris Jurusan Akutansi Universitas Darma Persada, Jakarta.
5. Segenap staf administrasi Universitas Darma Persada, yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan studi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. Bpk Robert, Bpk Sony, Ibu. Arishasi, Bapak Abdillah dan segenap karyawan KPP Jakarta Tebet, yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh informasi tentang KPP.
7. Kepada segenap Karyawan dan Ibu-ibu Pengurus di DWP Deplu yang telah banyak memberikan dukungan, masukan, serta meyakinkan penulis untuk dapat secepatnya menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Rhiza, Novie, Ella, Aini, Dwi, Isti, Wiwit, Indry, Yuli dan mba Wati, Taqul yang saling mendukung dalam pembuatan skripsi ini.
9. Teman – teman Jurusan Akutansi khususnya angkatan 2002 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan persahabatan selama ini.
10. Kepada pihak – pihak lain yang belum penulis sebutkan pada kesempatan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran merupakan masukan yang sangat berarti bagi penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri.

Jakarta, Juli 2007

Penulis,

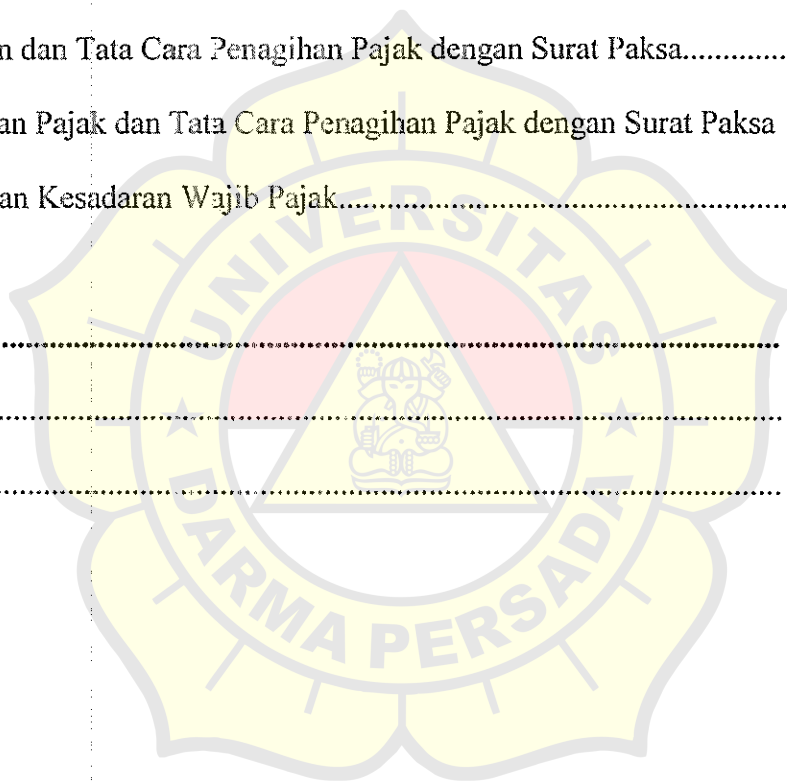
( Riani )

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Pembatasan Masalah.....	3
1.4 Perumusan Masalah.....	4
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Metodologi Penelitian.....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	9
2.1.1 Pengertian Pajak.....	9

2.1.2	Dasar Hukum Pajak.....	10
2.1.3	Fungsi Pajak.....	12
2.1.4	Jenis-jenis Pajak.....	13
2.2	Tinjauan Umum Tentang Penagihan Pajak.....	14
2.2.1	Pengertian Penagihan Pajak.....	14
2.2.2	Dasar Hukum Penagihan Pajak.....	15
2.2.3	Penanggung Pajak.....	16
2.2.4	Jurusita Pajak.....	16
2.2.5	Penagihan Seketika dan Sekaligus.....	18
2.2.6	Daluarsa Tindakan Penagihan Pajak.....	20
2.2.7	Hak Mendahului.....	21
2.2.8	Pemblokiran Harta di Bank.....	22
2.2.9	Penyitaan.....	23
2.3	Mekanisme Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	27
2.3.1	Pengertian Surat Paksa.....	27
2.3.2	Dasar Hukum Surat Paksa.....	29
2.3.3	Isi dan Karakter Surat Paksa.....	29
2.3.4	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	30
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KPP.....</b>		<b>33</b>
3.1	Sejarah Singkat KPP.....	33
3.1.1	Kedudukan dan Fungsi.....	35

3.1.2 Wilayah Kerja.....	35
3.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	36
3.3 Visi dan Misi KPP.....	42
<b>BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1 Penerimaan atas Penagihan Pajak.....	43
4.2 Proses Pelaksanaan dan Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	46
4.3 Analisa Pelaksanaan Pajak dan Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dengan bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi setiap warga Negara Indonesia.

Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan secara bertahap, dengan terencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Agar pembangunan nasional tersebut dapat tercapai seperti yang diharapkan, maka dibutuhkan dukungan dari segala pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Salah satu dukungan yang dapat diberikan oleh masyarakat adalah dana yang berupa pembayaran pajak. Saat ini pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang sangat diandalkan. Hal ini dapat kita lihat dari terus ditingkatkannya peran pajak dalam beberapa tahun terakhir ini. Pemenuhan target penerimaan pajak tersebut sangat di pengaruhi oleh peranan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, peran serta masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya

masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak yang diakibatkan oleh kurangnya niat atau kepedulian masyarakat Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya sebagaimana mestinya. Terhadap tunggakan tersebut, diperlukan undang-undang penagihan pajak yang dapat mengatasi semua permasalahan yang timbul di masyarakat, khususnya permasalahan mengenai tunggakan pajak yang mampu memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak, maka perlu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Undang-undang penagihan pajak yang demikian diharapkan dapat memberi penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan tersebut berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum. Dikarenakan perlunya kekuatan hukum yang bersifat memaksa tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin dalam menyempurnakan sistem perpajakan di Indonesia dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Perubahan yang terjadi adalah merupakan perbaikan seperti yang terjadi pada Undang-undang Nomor 19 tahun 1959 yang

akhirnya di revisi menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 dan kemudian di revisi kembali menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2000.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa hal tersebut secara lebih rinci dalam penelitian dengan judul **"Proses dan Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet"**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Hal-hal apa saja yang merupakan hak, kewajiban serta wewenang yang boleh dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet dalam menjalankan Penagihan Pajak.
2. Bagaimana cara yang paling efektif dan efisien yang dilakukan oleh KPP dalam menyampaikan tata cara pembayaran pajak kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat memahami kegiatan Penagihan Pajak yang baik.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Sesuai dengan skripsi ini, maka masalah yang diteliti oleh penulis hanya memperhitungkan cara-cara apa saja yang biasanya dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet dalam menjalankan kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak.

#### 1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang penulis buat, penulis mencoba merumuskan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet dalam melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?
2. Apakah proses Penagihan Pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tebet sudah sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2000, serta berbagai perintah pelaksanaan yang terbaik?

#### 1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana urutan diturunkannya Surat Tagihan Pajak dengan Surat Paksa kepada Wajib Pajak, dan sebab-sebab diturunkannya Surat Paksa tersebut.
2. Untuk mengetahui penetapan apakah pengenaan Surat Paksa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Tebet sudah sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku.

##### Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan di dalam proses penelitian dan penulisan khususnya masalah perpajakan, sehingga penulis dapat mengaplikasikannya dalam praktek.

2. Bagi masyarakat, sebagai salah satu solusi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan.
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya pada bidang perpajakan di Indonesia.

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1. Sumber Data

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, diperlukan suatu data yang cukup memadai dan mendukung, sehingga dapat digunakan di masa yang akan datang. Maka sumber data yang digunakan penulis antara lain:

#### a. Data Primer

Merupakan sumber data yang akan diperoleh melalui kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan, dengan melakukan pengamatan dan penelitian secara langsung pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan.

#### b. Data Skunder

Merupakan sumber data yang diperoleh dari buku-buku atau referensi yang berupa teori-teori yang mendukung dan berhubungan dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan objek dari penulisan skripsi ini.

## 2. Metode Pengumpulan Data

### a. Riset Lapangan

Riset ini dilakukan dengan jalan melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi objek penelitian, yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut.

### b. Riset Kepustakaan

Riset ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari data literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas data tersebut diperoleh dari berbagai buku, majalah dan jurnal yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab. Pada bagian ini penulis ingin menggambarkan secara umum dan singkat mengenai bab-bab yang ada pada skripsi. Adapun isi dari masing-masing bab secara singkat adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk membahas tentang Surat Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, identifikasi masalah, pembatasan

masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian Pajak, Dasar-dasar hukum Pajak, Fungsi dari Pajak Jenis-jenis Pajak yang ada, Pengertian dari Penagihan Pajak, dasar hukum dari Penagihan Pajak, yang merupakan Penanggung Pajak, Jurusita Pajak, Penagihan Seketika dan Sekaligus, Daluarsa, Mekanisme Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pengertian dari Surat Paksa serta dasar hukumnya.

## **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG KPP JAKARTA TEBET**

Dalam bab ini akan dibahas Sejarah singkat KPP yang merupakan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai Struktur Organisasi dan uraian tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Tebet serta Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri.

## **BAB IV ANALISA DATA**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan analisa tentang Proses Penghitungan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta Pelaksanaan dan Tata Cara Penagihan Pajak dengan Surat Paksa untuk meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak yang diawali dengan

keluarnya Surat Tagihan Pajak (STP) sampai dengan keluarnya Surat Paksa akan dikenakan kepada Wajib Pajak tersebut.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan serta saran-saran yang mungkin bermanfaat.

